



Buletin Parlementaria



Komunitas Pengrajin Dapat Dorong Roda Perekonomian Masyarakat



3 DPR Terima
Keterangan
Pemerintah
atas Pelaksanaan
APBN 2022



4 DPR tetapkan
Tujuh Anggota
Badan Supervisi BI
2023-2028

Nomor 1255/III/VII/2023 • Juli 2023



9 772614 339005



Komunitas Pengrajin Dapat Dorong Roda Perekonomian Masyarakat

Menghidupkan produk kreatif yang berdampak nilai ekonomis dan bahkan dapat menyejahterakan masyarakat pengrajinnya memang tidaklah mudah. Hal ini diakui oleh Anggota Komisi X DPR RI Desy Ratnasari saat melakukan kunjungan kerja reses bersama tim ke salah satu pelaku usaha ekonomi kreatif di Sumatera Barat. Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan perhatian dari berbagai pihak terhadap para pengrajin tersebut.

Supaya mereka dapat berkumpul menjadi sebuah komunitas, sehingga dapat memberdayakan mereka. "Dengan adanya komunitas pengrajin di harapkan mampu menjadi fasilitator untuk para pembeli ataupun konsumen yang memang paham dan mengerti serta menghargai nilai kreativitasnya. Dan yang terpenting sekali kalau bukan kita yang membeli masyarakat Indonesia siapa lagi yang mau menghargai hasil karya kreativitas anak bangsa serta dapat menghidupkan roda perekonomian," sebutnya usai meninjau salah satu tempat khusus ekonomi kreatif di Kota Padang, Sumatra Barat, Jumat, (14/7).

Galeri kerajinan yang menawarkan koleksi-koleksi yang berkelas, seperti kain songket dengan bordiran yang begitu cantik, tersedia berbagai macam pilihan dengan kualitas sangat baik. Sebagai karya anak bangsa menurut Politisi PAN ini, aspek kreativitas para pengrajin sangat luar biasa. Untuk itu menurut

Desy, jika pergi ke daerah-daerah, wajib rasanya bagi para pelancong mengunjungi tempat-tempat yang menawarkan produk kerajinan karya anak bangsa. Serta dapat juga dibeli sehingga roda perekonomian mereka terus berjalan.

"Kita harus bangga akan karya-karya mereka, bisa menghargai karya anak bangsa, cinta produk Indonesia dan tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, itu yang terpenting," jelas Legislator asal Jawa Barat ini. Desy menjelaskan hasil cipta atau karya bidang ekonomi kreatif itu nilainya tanpa Batas. Bisa dari mulai yang bersifat hanya ada satu dalam satu karya tersebut atau juga yang bernilai universal artinya diproduksi secara massal.

Dengan demikian masyarakat yang mengerti akan sebuah karya seni, tidak akan mengeluhkan harga yang ditawarkan. Pasalnya sudah

memiliki pengetahuan tentang karya seni itu yang dapat bernilai ekonomi sangat tinggi.

Ditempat yang sama Anggota Komisi X Djohar Arifin Husein menjelaskan hari ini tim Kunjungan kerja reses Komisi X kali ini berkunjung ke satu tempat industri, kerajinan tangan yang luar biasa, dibina oleh pengusaha dan masyarakat setempat. Menurutnya perlu dukungan yang kuat dari semua pihak terkait agar mereka bisa berkreatifitas lebih baik lagi.

"Organisasi ini melatih sekitar 300-an masyarakat dari seluruh kabupaten di Sumatera Barat dan mereka setelah mahir dapat memproduksi hasilnya nanti bisa ditampung di galeri ini suatu hal yang luar biasa, yang perlu kita contoh, perlu didukung, perlu dikembangkan," jelasnya.

— rni/aha



FOTORSB/PDT

Anggota Komisi X DPR RI Desy Ratnasari saat meninjau salah satu tempat khusus ekonomi kreatif, Henni Adli Minangkabau Gallery dan Villa Provinsi Sumatra Barat (Padang), Jumat, (14/7/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya





DPR Terima Keterangan Pemerintah atas Pelaksanaan APBN 2022

DPR RI menerima penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 pada Rapat Paripurna yang diselenggarakan pada Selasa (11/7) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

"Sesuai dengan amanat pasal 184 UU No 17 tahun 2014 tentang DPR, MPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU No 42 tahun 2014 disebutkan pasal 184 bahwa Presiden menyampaikan RUU Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir," ujar Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat memimpin rapat.

Puan juga menjelaskan bahwa laporan keuangan yang dijelaskan sebelumnya paling

sedikit meliputi RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022, realisasi APBN, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan kementerian dan lembaga.

Dalam pidatonya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menuturkan bahwa BPK memberikan penilaian terbaik atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2022, yaitu berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Opini WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022, dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

uc/aha



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K. PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Fadlun Bariyah, Prima Danutirta, A.Md,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Fauzizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firda Dysie, Bulegys Maeshyntha, Anju Alfionco Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Devi Iriandil, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afdillah, Geraldidi Opie, Hasni Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayawati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Ria Damayanti

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Scan QR
untuk berita
selengkapny



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani usai membacakan pidato pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/07/2023).

DPR tetapkan Tujuh Anggota Badan Supervisi BI 2023-2028



Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk F. Paulus saat menetapkan tujuh nama anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) melalui Rapat Paripurna yang dilaksanakan pada Kamis (13/7/2023) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

DPR RI menetapkan tujuh nama anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) melalui Rapat Paripurna yang dilaksanakan pada Kamis (13/7) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Tujuh Anggota BSBI tersebut telah melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan pada 6-7 Juli 2023, sebagaimana yang tertera dalam laporan Komisi XI DPR RI atas hasil pembahasan calon anggota BSBI.

"Perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan komisi XI DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota badan supervisi Bank Indonesia periode 2023-2028 tersebut dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk F. Paulus saat memimpin rapat. Sontak disetujui forum.

Mekanisme pengambilan keputusan atas uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota BSBI 2023-2028 sendiri dilakukan secara musyawarah dan mufakat sesuai dengan peraturan DPR RI tentang tata tertib. Adapun 7 (tujuh) nama yang ditetapkan DPR RI menjadi Anggota BSBI antara lain Marwanto Harjowiryono, Mohammad Khusaini, Piter Abdullah Redjalam, Iskandar Simorangkir, Irwan Lubis, Muhammad Nawir Messi dan Agus Herta Sumarto.

"Pimpinan dewan mengucapkan selamat kepada calon anggota Badan Supervisi Bank Indonesia periode 2023-2028, semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, bertanggung jawab dan penuh amanah," lanjut Politisi Partai Golongan Karya tersebut.

BSBI merupakan amanat Nomor

4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa Badan Supervisi Bank Indonesia berfungsi membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan Bank Indonesia.

Termaktub pula dalam UU P2SK, penjelasan mengenai kelembagaan BSBI seperti; Keanggotaan Badan Supervisi Bank Indonesia berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua yang dipilih dari dan oleh anggotanya. Anggota BSBI menjabat selama 5 (lima) tahun dan terdiri atas unsur Pemerintah, akademisi, dan masyarakat. **uc/aha**



Dua Nama ADK OJK Periode 2023-2028 Disetujui dalam Rapat Paripurna DPR



FOTO: JKA/PDT

Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus (dua dari kiri) dalam Rapat Paripurna Ke-29 Masa Sidang V Tahun 2022-203 mengesahkan dua nama Anggota Dewan Komisiner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2023-2028 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7/2023).

DPR RI dalam Rapat Paripurna Ke-29 Masa Sidang V Tahun 2022-203 mengesahkan dua nama Anggota Dewan Komisiner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2023-2028. Keputusan itu disetujui dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7).

"Sidang dewan yang kami hormati, kami tanyakan pada anggota dewan, apakah hasil Komisi XI DPR RI atas uji kelayakan calon ADK OJK periode 2023-2028 tersebut dapat disetujui," tanya Wakil

Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menyampaikan laporan hasil pembahasan Calon ADK OJK. Komisi XI DPR RI telah melakukan uji kepatutan dan uji kelayakan terhadap empat calon ADK OJK pada tanggal 10 Juli 2023 dan menyetujui dua nama ADK OJK melalui rapat internal.

"Uji Kepatutan dan uji kelayakan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 10.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB dan dilanjutkan dengan Rapat Internal Pengambilan Keputusan yang dilakukan secara

musyawarah untuk mufakat dan menyetujui memilih dua nama menjadi Anggota Dewan Komisiner OJK Periode 2023-2028," ujarnya.

Dua nama tersebut yakni Agusman sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisiner. Serta Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK. [gal/aha](#)

Scan QR untuk berita selengkapnya



Paripurna DPR Sepakat Perpanjang Pembahasan Enam RUU



FOTO:FSI/PDT

Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus dalam Rapat Paripurna ke-30 Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7/2023).

DPR RI menyatakan sepakat untuk memperpanjang waktu pembahasan terhadap 6 (enam) Rancangan Undang-Undang (RUU). Adapun masing-masing dari RUU tersebut akan diperpanjang hingga pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 mendatang.

"Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam Rapat Paripurna hari ini, apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap 6 (enam) Rancangan Undang-Undang dimaksud sampai dengan Masa Sidang I yang akan datang?," tanya

”

SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT, MAKA DALAM RAPAT PARIPURNA HARI INI, APAKAH KITA DAPAT MENYETUJUI PERPANJANGAN WAKTU PEMBAHASAN TERHADAP 6 (ENAM) RANCANGAN UNDANG-UNDANG DIMAKSUD SAMPAI DENGAN MASA SIDANG I YANG AKAN DATANG?

Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus dalam Rapat Paripurna ke-30 Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7).

Selanjutnya, seluruh Anggota DPR yang hadir menyatakan setuju untuk memperpanjang waktu pembahasan 6 (enam) RUU tersebut. Diketahui, kesepakatan perpanjangan waktu RUU berlandaskan permintaan dari Pimpinan Komisi II, Pimpinan Komisi III, Pimpinan Komisi IV, dan Pimpinan Komisi VII DPR saat menyampaikan laporan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 12 Juli 2023.

Sebagai informasi, berikut 6 (enam) RUU yang disepakati akan diperpanjang oleh DPR di antaranya RUU Tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBT), RUU Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE), RUU Tentang Perubahan atas RUU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN), RUU Tentang Hukum Acara Perdata, RUU Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, RUU Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh 312 Anggota Dewan secara fisik. Di mana, turut dihadiri oleh jajaran Pimpinan DPR RI mulai dari Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar.

ts/aha

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Tutup Masa Sidang DPR, Puan Jelaskan Pengawasan Haji dan UU Kesehatan

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menutup Masa Persidangan V DPR Tahun Sidang 2022-2023. Ia pun menyampaikan laporan kinerja dewan selama masa persidangan tersebut serta memberi perhatian terhadap sejumlah hal, antara lain mengenai Undang-Undang Kesehatan yang baru saja disahkan DPR.

Di awal pidato penutupan masa sidang DPR kali ini, Puan merinci kegiatan yang telah dilakukan dewan sejak pembukaan masa sidang pada 16 Mei 2023. Dari fungsi legislasi, DPR telah mengesahkan UU tentang Kesehatan Omnibus Law. Kehadiran UU Kesehatan yang baru, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi rakyat.

Selain itu, DPR telah menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai Usul Inisiatif DPR RI. Puan menyebut, revisi UU Desa dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI, merupakan upaya untuk memajukan perekonomian masyarakat desa, mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan," paparnya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7)

Ia juga menyebut DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati kebijakan-kebijakan fiskal untuk APBN Tahun Anggaran 2024 yang berbasis pada kesejahteraan rakyat. Puan mengatakan, perumusan kebijakan fiskal diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Saat ini ketahanan perekonomian Indonesia sudah cukup terjaga di tengah berbagai gejolak perekonomian dunia. Indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia dan inflasi saat ini, menunjukkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terbaik di antara negara-negara ASEAN dan G20," lanjut Puan.

Ditambahkannya, DPR mengapresiasi kinerja pemerintah dalam mengoptimalkan penyerapan APBN. Puan berharap berbagai kesepakatan, rekomendasi, dan catatan pada masa sidang ini akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2024

yang akan disampaikan pada bulan Agustus nanti. "DPR RI akan terus mencermati agar Nota Keuangan dan APBN Tahun 2024 benar-benar diarahkan sebagai anggaran berbasis kesejahteraan rakyat," jelas Puan.

Lebih lanjut, Puan mengatakan DPR di masa persidangan ini juga telah melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan Ibadah Haji mulai dari persiapan hingga mengirim Tim Pengawasan Haji saat pelaksanaan. Meskipun Ibadah Haji berjalan lancar, ia berharap pemerintah terus mengoptimalkan pelayanan demi kenyamanan jemaah Indonesia.

— **bia/aha**



Ketua DPR RI Puan Maharani membacakan pidato penutupan Masa Persidangan V DPR Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/07/2023).

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Tarif QRIS Harus Ditunda, Gus Imin: UMKM Baru Bangkit

Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra)

Abdul Muhaimin Iskandar meminta Bank Indonesia (BI) untuk menunda pemberlakuan biaya layanan QRIS bagi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) sebesar 0,3 persen. Pria yang akrab disapa Gus Imin ini menyatakan, meski biaya layanan itu dibebankan kepada PJP, namun tidak menutup kemungkinan bakal juga berdampak kepada pelaku usaha teruma UMKM serta para konsumen.

"Saya minta Bank Indonesia menunda pengenaan biaya transaksi QRIS 0,3 persen untuk mikro. Kembalikan lagi seperti semula (0 persen). Kalau ini tetap diberlakukan saya kira semua akan kena dampak, bukan cuma penyedia jasa, tapi pelaku usaha, UMKM, sampai konsumen juga pasti kena imbas," kata Gus Imin dalam keterangan resmi yang diterima **Parlementaria** pada, Senin (10/7).

”

SAYA MINTA BANK INDONESIA MENUNDA PENGENAAN BIAYA TRANSAKSI QRIS 0,3 PERSEN UNTUK MIKRO. KEMBALIKAN LAGI SEPerti SEMULA (0 PERSEN). KALAU INI TETAP DIBERLAKUKAN SAYA KIRA SEMUA AKAN KENA DAMPAK.



FOTO: IST/PDT

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat meninjau salah satu UMKM.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berujar, biaya layanan yang dibebankan kepada pemberlakuan biaya layanan QRIS juga dapat menghambat transaksi non tunai. Padahal, lanjutnya, transaksi non tunai yang sedang digencarkan saat ini punya efektivitas dan efisiensi yang tinggi dibanding model transaksi tunai.

"Dampaknya juga tentu ke transaksi non tunai, padahal ini kan lebih efektif dan efisien dibanding sistem pembayaran tunai. Belum lagi sekarang pelaku UMKM ini kan baru mulai bangkit pasca pandemi, janganlah dibebani dulu," tutur Legislator Dapil Jawa Timur VIII itu.

"Jadi saya tegaskan sebaiknya ditunda dulu (pemberlakuan biaya layanan QRIS). Ini ibarat kita mau naik motor biar cepat sampai, tapi ekor motornya diikat ke pohon. Ya enggak jalan," sambung Gus Imin.

Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) memberlakukan biaya layanan QRIS bagi PJP sebesar 0,3% yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2023. BI sebelumnya menetapkan ketentuan MDR QRIS bagi *merchant* UMKM jadi nol persen. Kebijakan itu berlaku hingga akhir Desember 2021 dan diperpanjang sampai 31 Desember 2022, kemudian dilonggarkan kembali sampai 30 Juni 2023.

uc/aha



Pembangunan Kawasan Perbatasan Wujudkan Peningkatan Kualitas Berbagai Aspek di Indonesia

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengatakan pembangunan kawasan perbatasan harus ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas manusia Indonesia. Selain itu, pembangunan kawasan tersebut juga ditujukan untuk struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, pembangunan yang merata dan berkeadilan dan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Untuk itu, setelah

pandemi berakhir, kini pemerintah harus kembali fokus untuk mempercepat pembangunan kawasan di daerah perbatasan.

"Kita ini kan ketika masa Covid, anggaran-anggaran ini banyak yang kita fokuskan dalam rangka untuk penanganan Covid ya. Setelah pemerintah juga mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi pandemi, sudah menjadi endemi tentu program-program yang selama ini agak terhambat perlu kita bahas kembali untuk kita lebih bisa lebih mempercepat pembangunan kawasan di daerah perbatasan," ujarnya kepada **Parlementaria**, usai Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan pemerintah, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (10/7).

Saat membacakan kesimpulan rapat, Gobel mengatakan bahwa pembangunan kawasan perbatasan tidak bisa dilakukan

hanya dengan suatu kegiatan yang bersifat rutinitas. Akan tetapi memerlukan upaya serius, kerja sama dan dengan persepsi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan terkait. "Agar kawasan perbatasan sebagai beranda depan bangsa dapat terbangun dengan baik dan terjaga kedaulatannya," jelasnya.

Selain itu, pembangunan kawasan perbatasan juga harus dilaksanakan secara sinergis oleh para pemangku kepentingan terkait yang sejalan dengan tujuan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara-Kawasan Perbatasan 2020-2024. Oleh sebab itu, Kementerian/Lembaga dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diminta terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif terkait kebijakan di sektor anggaran.

"Ke depan, BNPP perlu lebih menyerap masukan dari daerah-daerah terkait program yang dibutuhkan oleh daerah-daerah untuk pengembangan dan pemberdayaan kawasan perbatasan dan yang selanjutnya disinergikan dengan program pembangunan kawasan perbatasan dari Kementerian/Lembaga sehingga pembangunan kawasan perbatasan dapat terbangun secara holistik dan komprehensif," tutupnya.

bia/aha



FOTO: AZK/PDI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat memimpin rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan pemerintah, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2023).

Bebaskan Pilot Tersandera KKB, Komisi I Minta Pemerintah dan Aparat Utamakan Negosiasi

Upaya pembebasan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrrens yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua hingga kini masih terus berlangsung. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta Pemerintah dan aparat keamanan mengutamakan proses negosiasi dengan para penyandera.

"Negosiasi harus diutamakan. Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia harus bisa memastikan keselamatan sandera, tapi sekaligus tidak boleh merendahkan harga diri bangsa," kata Meutya Hafid kepada media, Kamis (6/7).

Diketahui, Philip Mark Mehrrens disandera oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya sejak 7 Februari lalu, sesaat setelah sang kapten pilot mendaratkan pesawatnya di lapangan terbang Paro. Egianus Kogoya dan kelompoknya juga membakar pesawat yang dikemudikan Mehrrens.

”

NEGOSIASI HARUS DIUTAMAKAN. PEMERINTAH DAN APARAT KEAMANAN INDONESIA HARUS BISA MEMASTIKAN KESELAMATAN SANDERA, TAPI SEKALIGUS TIDAK BOLEH MERENDAHKAN HARGA DIRI BANGSA.

KKB pun sebelumnya sempat mengancam akan menembak mati Mehrrens, dan berakhir dengan rencana pemenuhan uang tebusan sebesar Rp5 miliar agar KKB membebaskan pilot asal Selandia Baru itu. Meutya berharap, persoalan penyanderaan ini tak berhenti hanya dengan pemberian uang tebusan.

"Pemerintah jangan berhenti pada pemenuhan tuntutan uang tebusan kepada KKB dalam membebaskan pilot Susi Air. Harus ada pertimbangan langkah negosiasi lanjutan untuk meredakan aksi KKB yang masih terus terjadi sampai saat ini di Papua," tutur Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Meski begitu, Meutya memahami urgensi bagi Pemerintah dan aparat keamanan yang berencana memenuhi

permintaan uang tebusan untuk menyelamatkan pilot. Terlebih, itu menyangkut hubungan dengan negara lain. Ia juga meyakini Pemerintah dan aparat keamanan juga telah melakukan berbagai upaya strategis yang tidak semuanya bisa disampaikan ke publik.

"Keselamatan nyawa manusia memang paling penting. Apalagi, ini juga terkait dengan persoalan diplomatik dengan negara asal pilot yang disandera," tegas Legislator dari Dapil Sumatera Utara I ini.

— hal/rdn

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.



FOTO: RSB/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



Komisi II Desak Kapolri Evaluasi Mendalam Konflik Agraria di Riau

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo segera melakukan Analisa Evaluasi (ANEV) mendalam terhadap kinerja Kepolisian Daerah Riau. Hal itu khususnya dalam penanganan kasus konflik agraria antara masyarakat Koto Gasib, Dayun dan Mempura dengan PT Duta Swakarya Indah (DSI).

"Kami mendesak Kapolri segera turun tangan melakukan evaluasi mendalam atas penanganan konflik antar masyarakat dengan PT DSI," tegas Junimart Girsang dalam kesimpulan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Panja Mafia tanah bersama perwakilan masyarakat Koto Gasib, Dayun dan Mempura di Ruang rapat Komisi II DPR RI, Senin (10/7).

Dikatakannya, desakan itu adalah sebagai bentuk tindak lanjut atas permintaan yang sebelumnya juga telah disampaikan dalam rapat evaluasi satuan tugas (Satgas) Mafia Tanah di Riau beberapa waktu lalu Senin, (26/6).

”

KAMI MENDESAK KAPOLRI SEGERA TURUN TANGAN MELAKUKAN EVALUASI MENDALAM ATAS PENANGANAN KONFLIK ANTAR MASYARAKAT DENGAN PT DSI.

"Karena sebelumnya Panja DPR juga sudah meminta kepada Polda Riau untuk menarik personil Polri yang diperbantukan menjaga lahan atas permintaan Pt. DSI, serta membongkar jembatan yang dibuat oleh oknum suruhan PT DSI di atas lahan masyarakat, tetapi tidak juga ditindak lanjuti, bahkan diduga dikawal Polri," ujar Ketua Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah Komisi II ini.

Junimart menjelaskan, permintaan agar Satgas Mafia Tanah di Riau bersikap profesional dan tegas juga telah disampaikan langsung kepada Kepala kantor wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau dan Kapolda Riau dalam kunker Spesifik dua minggu yang lalu di Pekanbaru.

Selain itu Junimart juga menyinggung terkait laporan masyarakat langsung atas dugaan pencurian buah kelapa sawit milik masyarakat oleh sejumlah orang suruhan PT DSI yang tak kunjung ditindak oleh Polda Riau, meskipun masyarakat telah berulang kali melaporkan aksi pencurian itu dan masyarakat dilarang memanen buah sawitnya sendiri.

"Itu sudah jelas berdasarkan alas hak sertifikat hak milik masyarakat, tetapi buah kelapa sawitnya saat ini dipanen oleh orang suruhan PT DSI. Masyarakat telah melaporkan hal itu berulang kali kepada kepolisian di Riau, tetapi tidak kunjung ditindaklanjuti, justru masyarakat terkesan di-*pressure*," paparnya.

Dijelaskannya, aksi pencurian itu selama ini dapat berjalan mulus karena keberadaan jembatan yang sengaja di bangun oleh PT DSI diatas parit kanal kebun milik masyarakat. Sehingga sudah sepatutnya parit tersebut untuk segera dibongkar oleh Kepolisian Daerah Riau. **we/aha**



FOTO: DPR/PDT

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang dalam kesimpulan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Panja Mafia tanah bersama perwakilan masyarakat Koto Gasib, Dayun dan Mempura di Ruang rapat Komisi II DPR RI, Senin, (10/7/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Polri Harus Perhatikan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Perbatasan

Anggota Komisi III DPR RI Jacki Uly meminta Polri untuk memperhatikan pembangunan dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan. Menurutnya, sarana-prasarana di wilayah perbatasan, seperti di Polres Malaka, yang pernah dijumpainya tidak memiliki kendaraan.

"Jadi kalau ada kerusakan atau keributan untung Kapolresnya baik sama Dandim, adi bisa pinjam mobil dari Angkatan Darat. Andaikan tidak ada kan tidak enak kita mesti meminjam ke masyarakat atau menyewa," ujarnya dalam Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan pemerintah dengan agenda Evaluasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2023-2024, Senin (10/7).

Kemudian masalah perbatasan laut yang berada di Malaka. Ia pun meminta kepolisian dan TNI untuk memperkuat keamanan di perairan. Sebab menurutnya, perairan Malaka banyak sekali terjadi pencurian-pencurian ikan dan penyus. "Mohon diperhatikan karena selain laut itu juga bisa digunakan untuk masuknya narkoba karena di Singapura dari Timor Leste bisa masuk melalui darat dan laut," ungkapnya.

Pada masalah TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), ia mengaku Polres Malaka setiap dua bulan, selalu ada yang

banyak mayat yang merupakan korban dari TPPO di Indonesia berdatangan. Ia pun mengaku sudah melihat kuburannya juga dan menyebut sebagian besar merupakan masyarakat asal kabupaten Malaka yang bekerja di luar negeri.

Maka dari itu dirinya meminta agar kementerian perhubungan maupun imigrasi hadir di sana untuk menyelesaikan masalah tersebut. "Kita bisa melihat betapa rawan yang di situ, makanya sayang dari menteri perhubungan tidak ada di sini perlunya ada imigrasi ini untuk penjelasan mengenai masalah

ini. Jadi mohon diperhatikan," sebutnya.

Adapun kepada PUPR, dirinya meminta agar memperhatikan pembangunan perbatasan jalan di sana untuk menghindari ketersendatan. "Jangan sampai kena alasan apapun itu tersendat itu segera dibangun," tutupnya.

— hal,del/aha



FOTO:MR/PTD

Anggota Komisi III DPR RI Jacki Uly dalam Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan pemerintah dengan agenda Evaluasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2023-2024, Senin (10/7/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Sidak Tambak Ilegal di Batam, Komisi IV: Segel dan Pidanakan!

Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan tindakan penyegelan terhadap tambak udang di daerah Sembulang, Batam, Kepulauan Riau. Sebab, pengusaha tambak udang tersebut telah melakukan aktivitas usahanya secara ilegal.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin yang memimpin langsung penyegelan tersebut menyampaikan bahwa tambak udang yang ada di lokasi itu berada di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi tapi belum ada pelepasan. Sehingga dinyatakan aktivitas tersebut dianggap ilegal. Izin yang dimiliki pun tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

"Izin yang diajukan melalui OSS adalah mikro untuk usaha kecil. Sementara ini bukan (hutan) kecil, saya rasa ini uangnya miliaran juga, kalau mikro di bawah Rp200 juta," ujar Sudin di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (5/7).

"Tadi sudah berunding sama KKP dan Dirjen Gakkum, kami beri kebijakan tak boleh merugikan pengusaha, sampai panen baru tidak boleh lagi dijalankan. Kalau sekarang kita eksekusi kasihan, pengusaha kadang kurang mengerti peraturan yang ada. Sampai kira-kira 5 bulan ke depan baru kita tinjau kembali," imbuhnya.

Sementara itu Dirjen Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani menyatakan bahwa ada indikasi pelanggaran ataupun dugaan tindak pidana dari



FOTO:SKR/PDT

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat melihat langsung tindakan penyegelan terhadap tambak udang yang melakukan aktivitas usahanya secara ilegal di daerah Sembulang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (5/7/2023).

kejahatan kehutanan khususnya di lokasi tambak udang.

"Tim kami sedang mendalami dan melakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan. Total Luasan lahan \pm 9,2 Ha, dengan total luasan lahan yang digunakan untuk tambak udang 1600 m persegi x 4," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen PSDKP KKP Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin menyebut, tambak udang yang dibangun di kawasan itu merupakan konversi hutan mangrove menjadi dunia usaha. "Di sini kita ketahui ada tambak udang yang disinyalir menebang mangrove dijadikan tambak. Ini ancamannya pidana," tegas Adin Nurawaluddin.

Jika mengacu pada UU Cipta Kerja PP No 5 pelaku usaha tetap diberikan keleluasaan untuk memanen hasil tambaknya sampai empat bulan ke depan. Tapi setelah itu harus ditutup total. "Oleh karena itu kita menyegel semata-mata memberikan peringatan bahwa pelaku usaha di sini telah melanggar undang-undang. Kita konsen melakukan penegakan tapi tetap ekonomi berjalan. Setelah 4 bulan ke depan tidak ada perubahan maka akan kita tutup total," tegasnya.

Dalam sidak tersebut juga ditemukan indikasi adanya penebangan dan penimbunan mangrove yang dapat merusak ekosistem. "Mangrove ini kan menjaga alam, menjaga pantai, ini kan harus kita jaga. Kalau bukan kita siapa lagi yang akan menjaganya," terang Sudin.

skr/aha

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Komisi V Dorong Kawasan Gunung Kemukus Jadi Wisata Religi dan Wisata Keluarga



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras saat melihat langsung penataan kawasan Wisata Gunung Kemukus dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Selasa (11/7/2023).

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi V melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Sragen untuk melihat secara langsung penataan kawasan Wisata Gunung Kemukus. Kunjungan tersebut bertujuan menyerap aspirasi dan masukan-masukan dari Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan infrastruktur maupun transportasi di Kabupaten Sragen.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mendorong

dikembalikannya fungsi kawasan Gunung Kemukus sebagai destinasi wisata religi dan wisata keluarga bagi masyarakat Sragen dan sekitarnya. Dengan dilakukannya penataan Wisata Gunung Kemukus diharapkan stigma negatif terhadap Wisata Gunung Kemukus perlahan-lahan menghilang.

"Penataan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi sesungguhnya kawasan Gunung Kemukus sebagai destinasi wisata religi dan wisata keluarga di Sragen dan sekitarnya. Disamping itu juga meningkatkan

citra dan daya tarik Kawasan Wisata Gunung Kemukus untuk mendorong peningkatan kegiatan pariwisata sebagai sektor strategis dalam meningkatkan perekonomian wilayah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sragen," katanya dalam sambutan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Selasa (11/7)

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan kegiatan Penataan Kawasan Gunung Kemukus dilaksanakan pada September 2020 sampai dengan Desember 2021, dengan nilai kontrak sebesar Rp48 miliar. Sedangkan untuk kegiatan Operasi Pemeliharaan Optimalisasi dan Rehabilitasi (OPOR) Kawasan Gunung Kemukus dilaksanakan pada Oktober 2022 sampai dengan Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp639 juta. "Oleh karena itu, kehadiran Komisi V DPR RI dalam kunjungan kerja pada hari ini ingin mengetahui secara langsung dan menggali informasi terkait Penataan Kawasan Wisata Gunung Kemukus terutama dalam hal infrastruktur dan transportasi," imbuhnya.

Gunung Kemukus merupakan salah satu tempat wisata yang mengusung tema alam dan juga religi, berlokasi di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya penataan secara fisik objek Wisata Gunung Kemukus, wajah objek Wisata Gunung Kemukus terlihat lebih bagus dan sudah jauh dari kesan negatif.

tra/aha

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



Rafly Kande Sayangkan Pemerintah Pindahkan Lokasi Investasi Kerja Sama Indonesia-India

Anggota Komisi VI DPR RI Rafly Kande menyayangkan Pemerintah Pusat melalui Bappenas ingin memindahkan lokasi investasi yang menjadi bagian dari kerja sama Indonesia-India di Kepulauan Andaman-Nicobar.

"Saya ingin menyampaikan isu tentang Dapil (daerah pemilihan) saya. Terkait kerja sama Indonesia-India dalam Aceh Andaman- Nicobar yang telah dilakukan *MOU* antara badan pengusaha kawasan Sabang dan India sejak awal 2022 lalu. Ini merupakan kabar gembira buat Aceh sekaligus harapan Baru buat

Aceh," ujar Rafly saat interupsi, dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-30 Masa Persidangan ke V Tahun Sidang 2022-2023 di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Namun, lanjut Politisi dari Dapil Aceh I ini, sangat disayangkan Bappenas, yaitu direktur wilayah I ingin memindahkan lokasi investasi tersebut. Rafly sendiri merasa heran dengan keputusan tersebut. Bahkan ia menilai seolah pemerintah pusat tidak pernah ikhlas membangun kemandirian Aceh. Padahal kemandirian Aceh itu, tegasnya, adalah harkat dan martabat pemerintah pusat itu sendiri.

"Saya melihat Pemerintah tidak bersungguh-sungguh untuk merawat

perdamaian yang sudah disepakati, di mana itu terlihat bahwa aspirasi-aspirasi dari rakyat Aceh itu diabaikan, baik terkait optimalisasi sumber daya manusia, juga optimalisasi sumber daya alamnya," tambahnya.

Menurut Politisi Fraksi PKS ini, bila kasih sayang tidak menjadi landasan berbangsa, maka jangan diharapkan akan ada doa-doa ketulusan dari rakyat untuk bangsa yang besar ini. Dari sana, tambahnya, ia berharap DPR RI di bawah kepemimpinan seorang perempuan, Puan Maharani bisa menjadi semangat dasar untuk merekatkan kembali bangsa ini, mewujudkan kembali cita-cita besar para pendiri bangsa dari awal masa kemerdekaan.

"Dan di Tahun 2024 akan menjadi sebuah momentum di mana Indonesia akan melaksanakan demokrasi penuh dengan kewibawaan. Ini penting sekali. Wabil khusus dari Aceh, saya ingin menyampaikan bahwa komitmen kami sejak Indonesia merdeka bahwa di dalam lahir batin kami adalah bagaimana membangun kemandirian Indonesia ini yang berdiri di kaki rakyatnya sendiri," tegasnya.

Diketahui, Pemerintah Indonesia dan India sepakat mendorong pengembangan konektivitas dan kerja sama ekonomi antara Aceh dengan Kepulauan Andaman-Nicobar, sesuai visi dan kesepakatan yang telah dilakukan antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Narendra Modi. [ayuu/aha](#)



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi VI DPR RI, Rafly Kande saat interupsi, dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-30 Masa Persidangan ke V Tahun Sidang 2022-2023 di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7/2023).

FOTO: AFR/PDT

Terima 23 Organisasi Kesehatan, Komisi IX Pastikan Kawal Turunan UU Kesehatan



FOTO: EOT/PDT

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena di ruang rapat Badan Legislatif (Baleg) di Kompleks Parlemen, DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Komisi IX DPR RI menerima audiensi dari perwakilan 23 organisasi lintas profesi di bidang kesehatan. Perwakilan 23 organisasi itu menyampaikan apresiasinya atas telah disahkannya Undang-Undang Kesehatan. Perwakilan organisasi diterima Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena di ruang rapat Badan Legislatif (Baleg) di Kompleks Parlemen, DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7).

Melki, biasa ia disapa, menjelaskan audiensi dilakukan untuk mendengarkan pendapat seluruh organisasi kesehatan mendukung UU Kesehatan. Dirinya pun memastikan pihaknya akan mengawal peraturan turunan UU Kesehatan di lapangan.

Menurut Melki, penggunaan metode Omnibus Law dipilih untuk

memudahkan penerapan UU Kesehatan di masyarakat. Sebab, saat ini masih terjadi tumpang tindih peraturan yang kerap menyulitkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Lewat Omnibus Law, UU kesehatan hadir untuk menjawab berbagai permasalahan di bidang kesehatan. Mulai dari pelayanan Kesehatan yang masih didominasi pendekatan kuratif, ketersediaan dan distribusi Sumber Daya Kesehatan (SDM), kesiapan menghadapi krisis kesehatan, aspek kemandirian farmasi dan alat kesehatan, aspek pembiayaan dan pemanfaatan teknologi Kesehatan.

Selain itu, lanjut Melki, UU Kesehatan juga mengamanatkan agar kesejahteraan tenaga kesehatan dan medis ditingkatkan.

Terkait *mandatory spending* atau dana wajib kesehatan yang dihilangkan dalam UU Kesehatan. Melki menjelaskan, dalam penyusunan RUU, Komisi IX bersama dengan pemerintah sempat mempertimbangkan adanya dua opsi. Hal itu terkait anggaran di sektor kesehatan untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan di Tanah Air berjalan dengan baik.

Pertama, pendekatan menggunakan *mandatory spending* di mana anggaran disiapkan sebelum memutuskan program apa yang akan dilakukan, atau kedua, memakai sistem yang dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yakni pola penganggaran berbasis kinerja.

"Setelah kemarin dibahas oleh semua fraksi dan juga pemerintah, akhirnya usulan pemerintah yang lebih banyak disetujui oleh berbagai fraksi," kata Melki

Dengan disetujuinya usulan pemerintah yakni menggunakan pola penganggaran berbasis kinerja, maka akan program kesehatan nasional maupun daerah akan dibahas dalam rencana induk bidang kesehatan atau RIBK yang diatur dalam UU Kesehatan.

Sebelumnya, Ketua Forum Dokter Susah Praktik (FDSP) Yenni Tan menilai pengesahan UU Kesehatan adalah kemenangan bagi para tenaga kerja kesehatan di Indonesia. "UU ini berbeda dibandingkan dengan UU sebelumnya yang menguntungkan ormas tertentu, tetapi merugikan banyak pihak dan rakyat," katanya.

ann/aha



Adrianus Asia Sidot: Kalbar Butuh Pemerataan Pendidikan

Kondisi geografis dengan sungai dan laut yang sangat luas menimbulkan kendala tersendiri untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Kalimantan Barat (Kalbar). Banyak desa terpencil di Kalbar belum mendapat layanan pendidikan yang memadai.

Demikian disampaikan Anggota Komisi X DPR RI dari daerah pemilihan Kalbar II, Adrianus Asia Sidot kepada **Parlementaria** usai mengikuti pertemuan Komisi X DPR RI dengan Gubernur Kalbar di Pontianak, Kamis (6/7). "Khusus di Kalbar ini pemerataan pendidikan,

sarana prasarana, dan mutu pendidikan masih jauh. Butuh kerja keras semua stakeholder pendidikan untuk meningkatkan mutu," katanya.

Sidot mengungkapkan, pemerataan pendidikan yang timpang di Kalbar itu ditunjukkan dengan angka literasi, numerasi, dan pengetahuan yang rendah. Untuk itu, politisi Partai Golkar itu berharap, pemerataan sarana prasarana satuan pendidikan harus terus ditingkatkan dari mulai TK, SD, SMP, sampai SMK.

Masih banyak pekerjaan rumah lain yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk mengakses pemerataan pendidikan. Salah satunya adalah kompetensi

guru. Persoalan pelik pemerataan pendidikan ini akhirnya berdampak pula pada indeks pembangunan manusia (IPM) di Kalbar.

"Salah satu indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia) adalah pendidikan. Kalau pelayanan pemerataan pendidikannya masih bermasalah, bagaimana kita bisa meningkatkan IPM kita. Selama pelayanan pendidikan belum memenuhi standar yang diinginkan dan standar mutu yang belum memenuhi syarat, ini jadi masalah besar bagi IPM kita. Maka itu IPM Kalbar belum naik," tutup mantan Bupati Kabupaten Landak, Kalbar ini.

—mh/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi X DPR RI Adrianus Asia Sidot saat mengikuti pertemuan Komisi X DPR RI dengan Gubernur Kalbar di Pontianak, Kamis (6/7/2023).

FOTO: Mh/PDT

Pertumbuhan *Fintech* Sangat Pesat, Perlu Regulasi Perlindungan Nasabah

Komisi XI DPR RI melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan (*fit and proper test*) terhadap empat calon anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK). Berdasarkan surat yang dikirim Presiden Jokowi ke DPR, empat calon DK OJK tersebut adalah Agusman, Adi Budiarto, Hasan Fauzi, dan Erwin Haryono.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan calon DK OJK harus mampu menyelesaikan masalah sektor *financial technology* (*fintech*) yang tengah mengalami permasalahan. Berdasarkan laporan catatan

dari LAPS SJK, per oktober 2022 jumlahnya telah mencapai 302 pengaduan dari masyarakat.

"Masalah *fintech* ini perlu ditanggapi secara serius, sebab bagi kebanyakan orang mungkin masalah bunga yang tinggi menjadi masalah utama yang banyak dikeluhkan terutama pada pelaku usaha UMKM," pungkas Misbakhun saat *fit and proper test* calon DK OJK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/7).

"Semakin banyaknya *fintech* ilegal yang tidak terdaftar di OJK mengenakan biaya bunga dan denda yang begitu besar dan tidak transparan," tambah Politisi Golongan Karya ini.

Adapun empat calon DK OJK tersebut diajukan untuk menempati dua posisi. Agusman dan Adi Budiarto diusulkan sebagai calon Kepala

Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan.

Kemudian, Hasan Fauzi dan Erwin Haryono sebagai calon Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto. — **tn/aha**

”

MASALAH FINTECH INI PERLU DITANGGAPI SECARA SERIUS, SEBAB BAGI KEBANYAKAN ORANG MUNGKIN MASALAH BUNGA YANG TINGGI MENJADI MASALAH UTAMA YANG BANYAK DIKELUHKAN TERUTAMA PADA PELAKU USAHA UMK.



Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat *fit and proper test* calon DK OJK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/7/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



M. Nurdin Sebut Pentingnya Aturan terkait Sektor Sandang



FOTO: RR/PDT

Wakil Ketua Baleg DPR RI M Nurdin saat foto bersama usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI ke Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Senin (10/7/2023).

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI M. Nurdin menyampaikan bahwa sandang merupakan salah satu komoditas penting yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional, sehingga membuatnya perlu diatur secara jelas. Hal ini menjadi perhatian, di mana Baleg DPR tengah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap UU terkait industri dan perdagangan sandang.

"Saat ini, industri dan perdagangan sandang di Indonesia telah menjadi komoditas penting dan dapat mempengaruhi sistem perekonomian nasional. Untuk itu perlu diatur dengan baik agar kebutuhan sandang tercukupi

dan tidak mengganggu sistem perekonomian nasional yang ada," ungkapnya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Baleg DPR RI ke Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Senin (10/7).

Belum adanya badan dan aturan jelas terkait sandang berdampak terhadap lemahnya industri dan perdagangan sandang dalam negeri, yang bahkan tidak mampu untuk bersaing di pasar domestik. Sehingga, sebagai bentuk upaya memperkuat sektor sandang di Indonesia, Baleg DPR menyerap masukan dari berbagai pihak terkait, salah satunya dari para pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di provinsi Jawa Barat.

"Nah di Jawa Barat kita lihat tadi dari beberapa *stakeholder*

terkait masalah sandang, banyak dari mereka yang merasakan perlu adanya undang-undang yang mengatur masalah sandang ini. Oleh karena itu masukan ini akan kita bawa ke Baleg nanti untuk kita susun dalam draf dari undang-undang," ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Selain itu, M. Nurdin yang merupakan Anggota Komisi III DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat X itu juga menyoroti upaya penindakan dan perlindungan yang dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap maraknya peredaran produk industri TPT bekas dan ilegal dari negara asing.

"Jadi dalam kaitan dengan masalah ini, tidak hanya masalah peraturan tapi juga bagaimana penindakan dan perlindungan aparat penegak hukum dan pemerintah yang perlu ditinjau ulang terhadap masalah-masalah seperti ilegal import dan masuknya barang-barang bekas yang sangat mengganggu perkembangan industri tekstil di dalam negeri," paparnya.

Isu-isu terkait permasalahan sandang seperti itu menjadi salah satu penyebab sulitnya industri TPT berkembang dan maju di Indonesia. Untuk itu, Nurdin mengatakan pihaknya akan berupaya penuh dalam membenahi sektor sandang yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga.

"Laporan-laporan yang tidak sama antara kementerian perdagangan dan kementerian perindustrian akan kita evaluasi, masalahnya akan kita benahi. Karena dalam masalah ini ada 19 lembaga terkait sandang, jadi ada cukup banyak yang harus kita pelajari," pungkasnya. **rr/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Perekonomian Nasional Tunjukkan Kinerja yang Kian Ekspansif

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan bahwa perekonomian nasional menunjukkan kinerja yang kian ekspansif. Pasalnya, mengakhiri semester pertama tahun 2023, Suksesi kepemimpinan nasional yang akan segera berlangsung tidak serta merta membuat pelaku ekonomi *wait and see*. Pelaku ekonomi makin melek atas situasi politik nasional.

"Dan melihat arti penting bahwa perekonomian harus terus bergerak tanpa harus dibayangi kekhawatiran, khususnya atas dinamika politik yang berimplikasi pada ketidakpastian kebijakan," ungkap Said Abdullah dalam rilis yang diterima **Parlementaria**, Senin (11/7).

Ia menjelaskan pula bahwa keyakinan konsumen atas makin optimisnya perekonomian nasional bisa kita rujuk dari survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) pada Juni 2023. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) per Mei 2023 mencapai 128,3, lebih tinggi dibanding April 2023 sebesar 126,1.

Pergerakan perekonomian nasional juga terpantau dari tingkat konsumsi listrik pada sektor bisnis dan industri yang meningkat. Konsumsi listrik pada sektor bisnis pada Mei 2023 meningkat sebesar 16,4 persen dan sektor industri meningkat sebesar 14,2 persen (yoy). "Pertumbuhan ini ditopang oleh ekspansinya sektor makanan, minuman, tembakau

dan sandang," lanjutnya.

Untuk *Purchasing Manufacturing Index* (PMI), Said mengungkapkan bahwa PMI Indonesia juga terjaga dengan baik. Indeks PMI pada Mei 2023 di posisi 50,3 menjadi 52,7 pada Juni 2023. Posisi ini menjelaskan bahwa PMI Indonesia dalam lintasan yang cukup baik.

Adapun untuk kepercayaan konsumen atas membaiknya perekonomian nasional mendongkrak kinerja sektor kredit. Tercatat, Perbankan menyalurkan kredit pada Mei 2023 sebesar Rp. 6.561,2 triliun atau tumbuh 9,4 persen (yoy). "Pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding April 2023, yang sama-sama tumbuh namun di level 8,1 persen (yoy)," ujar Politisi Fraksi PDIP ini.

Ia menilai bahwa harapan atas perekonomian domestik yang membaik bak gayung bersambut dengan kalangan investor luar

negeri. Hal itu senada dengan kepercayaan investor global terhadap kinerja perekonomian nasional juga terjaga dengan baik. Hal itu tercermin dalam pergerakan arus modal global ke *emerging market* meningkat.

"*Capital Inflow* ke pasar obligasi Indonesia hingga 21 Juni mencapai Rp80,79 triliun secara year to date (ytd). Sedangkan di pasar saham terakumulasi sebesar Rp16,87 triliun (ytd)," tutupnya.

— rnm,hal/aha



FOTO: EOT/PDT



BKSAP Sampaikan Laporan Implementasi Resolusi AIPA dalam Kaukus AIPA ke-14 di Vietnam

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menghadiri Pertemuan Kaukus AIPA ke-14 (*the 14th Meeting of The AIPA Caucus*) yang diselenggarakan pada 10-11 Juli 2023 di Phu Quoc, Vietnam. Pertemuan Kaukus AIPA (*ASEAN Inter-Parliamentary Assembly*) ini menjadi forum untuk menyampaikan laporan implementasi dari resolusi AIPA yang telah diadopsi di masing-masing negara pada Sidang Umum AIPA ke-43 pada tahun 2022 lalu.

Dalam sesi pertama pertemuan Kaukus AIPA, Ketua Delegasi Parlemen Indonesia (*head of delegation*), Gilang Dhielafarez menyampaikan presentasi mengenai laporan Indonesia sebagai anggota AIPA tersebut. Ia menyebutkan, Anggota Parlemen AIPA memiliki peran penting dalam membentuk kebijakan dan kerangka sebagai landasan kerja.

"Pertemuan ini merupakan kesempatan berharga untuk bertukar pikiran, berbagi langkah praktis terbaik, dan berkolaborasi menuju masa depan inovasi yang didorong oleh pertumbuhan berkelanjutan di ASEAN," ujar Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini, di Phu Quoc, Vietnam, Senin (10/7).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini meyakini bahwa pertemuan Kaukus AIPA ini akan menghasilkan hal-hal yang produktif dan menjadi sarana



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Gilang Dhielafarez saat mengikuti pertemuan Kaukus AIPA ke 14 yang diselenggarakan pada 10-11 Juli 2023 di Phu Quoc, Vietnam, Senin (10/7/2023).

untuk memperkuat ikatan kerja sama antara anggota parlemen se-ASEAN.

"Secara bersama-sama, mari kita eksplorasi peluang untuk memanfaatkan kekuatan sains dan teknologi, menjamin aplikasi yang lebih adil dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan di negara-negara ASEAN," ujar Anggota Komisi III DPR RI ini.

Hadir pula dalam Pertemuan Kaukus AIPA ini, Anggota BKSAP DPR RI Himmatul Aliyah dan Sakinah Aljufri. Serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Sosialis Vietnam Denny Abdi bersama dengan Dhany

Rachmat Mulia sebagai Sekretaris Utama Kedubes Indonesia untuk Republik Sosialis Vietnam.

Diketahui, Kaukus AIPA diselenggarakan dengan tujuan untuk mendorong inisiatif dari lembaga legislatif untuk mengharmonisasikan perangkat hukum dari masing-masing anggota parlemen di tiap negara ASEAN. Sebagai salah satu Komite Ad-Hoc AIPA, Kaukus AIPA juga menjadi sarana reguler interaksi dari anggota parlemen se-ASEAN dalam memonitoring implementasi Resolusi AIPA yang diadopsi melalui Sidang Umum AIPA. **rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Forum APA Untungkan Indonesia dalam Konektivitas Internasional



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon saat menghadiri APA Standing Committee on Budget and Planning di Tehran, Iran, Selasa (11/07/2023).

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengatakan bahwa forum *Asian Parliamentary Assembly* (APA) akan menguntungkan bagi Indonesia, khususnya dalam membangun konektivitas internasional. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon usai menghadiri *APA Standing Committee on Budget and Planning* di Teheran, Iran.

"Saya kira ini forum atau platform yang sangat

”
SAYA KIRA INI FORUM ATAU PLATFORM YANG SANGAT MENGUNTUNGAN KITA. JADI, KITA BIASANYA JUGA BERKUMPUL NANTI DI INTER-PARLIAMENTARY UNION (IPU).

menguntungkan kita. Jadi, kita biasanya juga berkumpul nanti di *Inter-Parliamentary Union* (IPU). APA ini untuk saling mendukung antarnegara Asia. Jadi, kita banyak dukungan dari negara APA dan Indonesia sangat dihormati karena sangat aktif juga di dalam APA," ujarnya kepada **Parlementaria** usai agenda di Teheran, Iran, Selasa (11/7).

Fadli menjelaskan, APA adalah ajang untuk menjalin koneksi dengan Parlemen di Asia. Parlemen Indonesia sendiri, saat ini, kata Fadli sangat aktif di berbagai forum internasional. Maka dari itu, BKSAP DPR RI kata Fadli akan tetap aktif di Forum APA.

"Jadi BKSAP sebagai ujung tombak diplomasi parlemen, ini menjadi *vocal point* dari diplomasi parlemen. Termasuk di APA ini kita membantu kepentingan negara di dalam diplomasi negara untuk kepentingan nasional," ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Sebagai informasi, APA adalah sebuah organisasi antarparlemen di kawasan Asia. Saat ini, keketuaan dipegang oleh Turki. Indonesia adalah salah satu negara pendiri organisasi tersebut. Kehadirannya diharapkan bisa saling membantu para negara-negara anggota dalam menghadapi berbagai permasalahan.

Di Teheran sendiri, APA menggelar forum untuk membahas komitmen dari setiap negara anggota dalam menguatkan organisasi. Di forum tersebut diusulkan iuran dari setiap negara anggota untuk APA. BKSAP DPR RI pun mendukung apa yang didiskusikan dalam forum kali ini. **ndn/aha**





Setjen DPR Siap Bantu Persiapan Kunjungan Ketua Majelis Nasional Vietnam ke Indonesia



FOTO: RSB/PDT

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar usai menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Vietnam Tan Van Thong di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI siap membantu persiapan kunjungan Ketua Majelis Nasional Vietnam, Yang Mulia Vuong Dinh Hue, ke Indonesia yang direncanakan pada tanggal 4 sampai 6 Agustus 2023 mendatang. Direncanakan, Ketua Majelis Nasional Vietnam akan menggunakan pesawat pribadi dengan jumlah delegasi sebanyak 100 orang yang terdiri dari Anggota Parlemen dan juga pelaku bisnis dari Vietnam yang akan bertemu dengan KADIN.

"Dalam kunjungan tersebut, Delegasi Majelis Nasional Vietnam juga akan membicarakan perpanjangan draf MoU antara Indonesia dengan Vietnam yang sudah harus diperbaharui karena kadaluarsa," jelas Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar usai menerima kunjungan kehormatan Duta Besar

Vietnam Tan Van Thong di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7)

Draf *MOU*, jelas Indra, akan disampaikan melalui Kedutaan Besar Indonesia di Hanoi yang diharapkan dapat ditandatangani saat penyelenggaraan Sidang Umum AIPA yang akan berlangsung 6 sampai 10 Agustus 2023 yang akan datang. "Ya dulu pernah ada draf MoU yang dibuat antara Indonesia dengan Vietnam (Parlemen Indonesia dengan Vietnam) itu sudah cukup lama sehingga mereka menyarankan untuk diperbaiki *MOU*-nya sesuai dengan urgensi saat ini," ujar Indra.

Di sisi lain, tutur Indra, dalam kunjungan Ketua Majelis Nasional Vietnam saat ke Indonesia nantinya akan mengagendakan pertemuan dengan Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani pada tanggal 4 Agustus

2023 mendatang meliputi pertemuan dan juga jamuan resmi. Lalu, dilanjutkan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia yang berupa kunjungan kehormatan. "Kami akan menjajaki tentu hal ini kepada Sekretariat Presiden untuk jadwal Bapak Presiden berkaitan kunjungan (Delegasi Vietnam) ke Indonesia," terang Indra.

Tak hanya itu, Indra pada kesempatan tersebut juga menerangkan bahwa dari delegasi DPR saat ini sedang menghadiri *The 14th Meeting of The ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA Caucus)* di Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam, sejak Minggu (9/7) dalam rangka pertemuan dengan komisi luar negeri Majelis Nasional Vietnam. Pada pertemuan itu, ungkap Indra, pihak delegasi Vietnam menyampaikan beberapa tambahan agenda kunjungan yang ingin dilaksanakan oleh Delegasi Vietnam.

Di antaranya rencana pertemuan dengan Ketua DPD RI, pertemuan dengan Presiden ke-5 Indonesia, pertemuan dengan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Parlemen Vietnam. Lalu, pidato kuliah umum terkait kebijakan luar negeri Vietnam terhadap Indonesia di universitas yang dihadiri oleh para peneliti, mahasiswa dan institusi yang punya kerja sama dengan Vietnam.

"Yang kelima, yaitu mengadakan bisnis forum dengan tuan rumah dari pihak eksekutif pada tanggal 5 Agustus dengan fokus investasi perdagangan dengan mengundang KADIN, kementerian terkait dan kalangan industri yang terkait ekspor impor antara Indonesia dengan Vietnam," papar Indra. **pun/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya





LENSA PARLEMEN



WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI HABIBUROKHMAN SAAT MEMBUKA ACARA ANUGERAH KARYA JURNALISTIK III DAN PAMERAN FOTO WARNA WARNI PARLEMEN KE-13 DI SELASAR GEDUNG NUSANTARA II, JAKARTA, RABU (12/7/2023). FOTO: RSB/PDT



DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI SEKRETARIAT JENDERAL (SETJEN) DPR RI SUMARIYANDONO MEMIMPIN ACARA PELEPASAN TIM PORNAS SETJEN DPR RI DI GOR BULUTANGKIS SPORT CENTER DPR RI, RABU (13/7/2023). FOTO: JKA/PDT



Imron Amin usai dilantik sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Ruang MKD, Nusantara I, Jakarta, Senin (10/7/2023). FOTO:RSB/PDT

